

LAPORAN RISET MANDIRI

**Revitalisasi Kota Lama Semarang dalam Mendukung Paradiplomasi  
Pemerintah Kota Semarang**



**Oleh:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si | 196304221989032001     |
| 2. Satwika Paramasatya, SIP, MA        | 198907102018031001     |
| 3. Nadia Farabi, S.Hub.Int., MA        | H.7.199010272018072001 |

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul riset : Revitalisasi Kota Lama Semarang dalam Mendukung Paradiplomasi Pemerintah Kota Semarang
2. Kategori tema : Otonomi daerah dan desentralisasi
3. Bidang ilmu : Hubungan Internasional
4. Ketua peneliti
  - a. Nama lengkap dan gelar : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si.
  - b. NIP/NIDN : 196304221989032001 / 0022046308
  - c. Jabatan fungsional/gol : Lektor/3C
  - d. Fakultas/Departemen : ISIP / Hubungan Internasional
  - e. Alamat dan no. telp. kantor : Jl. Prof. Sudarto, SH, Semarang
  - f. Alamat dan no. telp. rumah : Jl. Tlogosari 1 No. 44 A, Bulusan, Semarang
5. Anggota I
  - a. Nama lengkap dan gelar : Satwika Paramasatya, SIP., MA
  - b. NIP/NIDN : 198907102018031001 / 0010078964
  - c. Departemen : Hubungan Internasional
6. Anggota II
  - a. Nama lengkap dan gelar : Nadia Farabi, S.Hub.Int., MA
  - b. NIP/NIDN : H.7.199010272018072001 / 0027109006
  - c. Departemen : Hubungan Internasional
7. Lokasi riset : Kota Semarang
8. Lama riset : 8 (delapan) bulan
9. Paket luaran publikasi : Artikel jurnal nasional terakreditasi dan prosiding
10. Biaya yang diperlukan : Rp. 30.000.000
11. Sumber dana : RKAT FISIP Undip Tahun Anggaran 2019

Semarang, 11 November 2019

Mengetahui,  
Pimpinan Fakultas,

Ketua Peneliti,

Dr. Hardi Warsono, MTP  
NIP. 196408271990011001

Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si  
NIP. 19630422 198903 2 001

## DAFTAR ISI

<b><i>HALAMAN PENGESAHAN</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>DAFTAR ISI</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>BAB I</i></b> .....	<b>4</b>
<b><i>PENDAHULUAN</i></b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Latar Balakang</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1.4 Kontribusi Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.5 Luaran Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.6 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>6</b>
<b>1.7 Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b><i>BAB II</i></b> .....	<b>11</b>
<b><i>PROFIL LOKASI PENELITIAN: KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH</i></b> ...	<b>11</b>
<b>2.1 Kondisi Terakhir dari Kota Lama Semarang</b> .....	<b>14</b>
<b>2.2 Sejarah Kota Lama Semarang</b> .....	<b>17</b>
<b>2.3 Upaya yang Sudah Dilakukan Pemerintah Kota Semarang</b> .....	<b>18</b>
<b><i>BAB III</i></b> .....	<b>21</b>
<b><i>ECOTOURISM SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN</i></b> .....	<b>21</b>
<b>3.1 Ecotourism sebagai Strategi Pembangunan yang Tepat</b> .....	<b>21</b>
<b>3.2 Faktor-faktor yang Mendukung Ecotourism</b> .....	<b>22</b>
<b>3.3 Pengembangan Masyarakat</b> .....	<b>24</b>
<b><i>BAB IV</i></b> .....	<b>28</b>
<b><i>KESIMPULAN DAN SARAN</i></b> .....	<b>28</b>
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b> .....	<b>29</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawati Sutawidjanto mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”, yang antara lain bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun citra baik kota, baik di level nasional maupun internasional, guna mendorong pembangunan ekonomi dan pariwisata lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis pengusaha, serta festival atau pameran (Kementerian Sekretariat Negara, 2007). Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA yang masih dipertahankan adalah Sem’Biz (Semarang Business Forum). Acara tahunan yang kini berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini memiliki tujuan khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan peran paradiplomasi, dapat kita sepakati bahwa pelaksanaan *sister city* membutuhkan identitas lokalitas yang kuat dari masing-masing kota. Kota yang tidak menegaskan lokalitasnya akan kalah dan terseret oleh lokalitas yang dimiliki oleh kota yang menjadi *partner*. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kedua kota yang menjalin kerja sama *sister city* untuk melihat ke dalam dan memastikan potensi lokalitas masing-masing, serta bagaimana menegaskannya sebelum memutuskan terjun dalam bingkai kerja sama *sister city*.

Salah satu sudut Kota Semarang yang saat ini gencar dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memikat wisatawan adalah Kota Lama Semarang (kompas.com, 2018). Kawasan Kota Lama Semarang, atau sering juga disebut Little Netherland, berisi gedung-gedung tua yang dibangun sejak zaman Belanda (bpad.jogjaprovo.go.id, 2016). Kawasan tersebut terpusat dari Sungai Mberok hingga menuju daerah Terboyo. Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha melakukan revitalisasi untuk menjadikan Kota Lama sebagai ikon Kota Semarang. Bahkan, Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan Rp.69 miliar (kompas.com, 2016) untuk perbaikan infrastruktur Kota Lama, seperti perbaikan drainase, mengingat kawasan Kota Lama yang sering terkena banjir apabila terjadi hujan deras. Tidak hanya perbaikan drainase, perbaikan jalan yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang juga sudah dilakukan.

Kawasan Kota Lama Semarang gencar dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang, untuk memikat wisatawan (kompas.com, 2018). Kota Lama Semarang merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, karena memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Banyak peninggalan penjajahan Belanda dan bangunan yang masih kokoh hingga saat ini, seperti GPIB (Gereja Protestan Indonesia bagian Barat), Stasiun Tawang, dan masih banyak bangunan lainnya yang masih menjadi objek pariwisata. Gedung bersejarah yang ada di kawasan Kota Lama sendiri merupakan hasil dari pemukiman orang Belanda dan bangsa Eropa lainnya, yang mempunyai mata pencaharian utama sebagai pedagang. Infrastruktur yang ada di kawasan Kota Lama Semarang juga sudah sangat berkembang. Menurut data pada Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011, total bangunan yang ada di kawasan Kota Lama Semarang mencapai 274 unit yang terdiri dari bangunan perumahan dan juga perkantoran. Saat ini, kawasan Kota Lama Semarang tengah diusulkan menjadi kota warisan budaya dunia UNESCO (kompas.com, 2017).

Tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari provinsi. Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional. Berbagai istilah dimunculkan sebagai upaya konseptualisasi fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-negara di level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin ditekankan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh revitalisasi Kota Lama Semarang terhadap aktivitas paradiplomasi Pemerintah Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan Kota Lama Semarang terhadap aktivitas paradiplomasi Pemerintah Kota Semarang. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh gambaran revitalisasi Kota Lama Semarang;

- b. Untuk mengetahui manfaat revitalisasi Kota Lama Semarang bagi peningkatan aktivitas luar negeri Pemerintah Kota Semarang.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan keunggulan penelitian Universitas Diponegoro dan meningkatkan daya saing Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian sosial humaniora, yang sejalan dengan fokus bidang penelitian Universitas Diponegoro, yakni pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan. Selama ini, konsep-konsep yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional dianggap sulit untuk membumi dengan kondisi di akar rumput.

#### **1.5 Luaran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Kota Semarang. Luaran penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi.

#### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Negara (dalam hal ini pemerintah pusat) tidak lagi menjadi satu-satunya aktor hubungan internasional Muncul aktor-aktor lain di luar Negara, seperti *non-governmental organizations* (NGOs) dan perusahaan multinasional. Lebih lanjut, tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari Daerah, sebagai unit pemerintahan di bawah negara. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional.

Kemunculan Kota sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya desentralisasi. Tujuan desentralisasi menurut perspektif desentralisasi administrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah, sebagaimana disampaikan oleh Rondinelli (1983, 4 dalam Syarif, 2008). Jika Rondinelli menekankan pada aspek pemerintah, maka Ruland (1992, Syarif, 2008), lebih menekankan aspek partisipasi masyarakat dalam

pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama desentralisasi, sehingga Ruland memberikan definisi sebagai berikut: “*Decentralisation, as a corollary local autonomy, is seen as a positive contribution to increase people participation, which would eventually lead to socio-economic development*” (1992, 3).

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fungsi sebagai *hub* atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di wilayahnya. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terfasilitasi oleh kerangka institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di tengah arus demokratisasi sebagai pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui kerangka tersebut, Pemerintah Kota Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang tergabung dalam *hinterland*-nya, memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan menjadi aktor paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada pengembangan potensi lokal.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah *hinterland* sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasi, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Events* (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang. Sebagai bentuk realisasi dari arah kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”.

Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga, berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Kemunculan aktor-aktor baru tersebut mendorong Rogier van der Pluijm dan Jan Melissen (2007) untuk mengkaji aktor diplomasi lain yang tidak kalah penting, yakni Kota atau Lokal. Menurut van der Pluijm dan Melissen, peran Kota perlu diperhitungkan di era globalisasi saat ini. Melalui tulisannya yang berjudul “*City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics*”, keduanya memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan *city diplomacy*, atau diplomasi lokal, atau paradiplomasi<sup>1</sup>.

Diplomasi lokal adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan aktor-aktor internasional lainnya, dimana tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan daerah (van der Pluijm & Melissen, 2007, 6). Warga negara tidak dapat disebut sebagai aktor dari diplomasi lokal, kecuali tergabung dalam gerakan sosial yang memang mewakili kota secara keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, diplomasi lokal dapat juga dianggap sebagai salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan hubungan internasional, karena Kota adalah aktor utamanya. Dalam banyak kasus, walikota adalah aktor yang seringkali diberi tanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri kotanya.

Segala hubungan luar negeri yang dijalankan Kota harus tetap mengacu pada politik luar negeri. Proses diplomasi Negara dan Kota akan berubah seiring dengan perubahan tujuan politik luar negeri. Dengan demikian, Negara dan Kota seakan berada pada rute yang sama, tetapi beda mobil. Negara dan Kota sama-sama terlibat dalam aktivitas diplomatik bukan untuk memperebutkan lahan yang sama, tetapi untuk saling melengkapi (van der Pluijm & Melissen, 2007, 12). Karena, Negara tidak lagi mampu menjalankan seluruh aktivitasnya sendiri, dan aktor seperti Kota perlu terlibat.

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prioritas metode dalam pelaksanaan pembangunan, dan berfungsi sebagai kiblat penyelenggaraan fungsi-fungsi publik (Grindle, 2007: 51-54). Aktor-aktor dalam *good governance* memiliki tugas, fungsi, dan perannya masing-masing, tetapi mengarah pada tujuan akhir yang sama, yakni pembangunan manusia yang berkelanjutan. Menurut Chhotray & Stocker (2009: 15-20), pemerintah bertugas menciptakan iklim politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang kondusif; menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hasil akhir dari kerja pemerintah adalah sebuah

---

<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, istilah diplomasi lokal dan paradiplomasi akan digunakan secara bergantian.



penjaminan tentang kesejahteraan rakyat yang harus dipenuhinya. Sementara itu, sektor privat atau swasta bertugas menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, serta menjamin keseimbangan ekonomi untuk semua orang, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Swasta diberi kesempatan untuk mengelola lingkungan dalam rangka penguatan ekonomi, tetapi dengan basis kebijakan keberlanjutan pembangunan. Terakhir, masyarakat memegang tugas utama yang berbasis partisipasi dan keterlibatan umum, guna mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, serta mengajak seluruh anggota masyarakat untuk aktif dalam pembangunan. Masyarakat menjadi obyek sekaligus subjek pembangunan, yang berorientasi untuk pembangunan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Sinergi yang dibangun ketiga aktor dengan tugasnya masing-masing tersebut diyakini dapat menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan *good governance*.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden, dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2006, 257). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam penelitian didapatkan dari literatur berupa buku-buku, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Lebih lanjut, guna mendapatkan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara. Sasaran utama dari wawancara adalah Pemerintah Kota Semarang, utamanya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dan implementasi kerja sama *sister city*. Wawancara akan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: a) menentukan subjek atau informan yang diwawancarai, b) mempersiapkan wawancara, c) melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan d) menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.

### **1.7.2 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif; dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan

verifikasi (Silalahi, 2006, 257). Tahap reduksi data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti mengorganisir data yang telah direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi data.

## BAB II

### PROFIL LOKASI PENELITIAN: KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Kota Semarang yang secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa merupakan pintu perdagangan sehingga secara historis memiliki posisi penting dalam perkembangan budaya lokal. Interaksi antara kelompok pendatang dan penduduk asli menjadikan Kota Semarang sebagai melting pot budaya Jawa, Arab, Cina, dan Belanda. Jejak akulturasi dan asimilasi budaya tersebut masih dapat ditemukan di Kota Semarang, misalnya dalam bentuk arsitektur, seni batik, hingga kuliner.

Eksistensi kelompok diaspora yang berbaur dengan penduduk asli juga menjadi bukti posisi Kota Semarang sebagai melting pot dari berbagai budaya semenjak berdiri 500 tahun yang lalu hingga di era globalisasi masa kini. Komunitas diaspora di wilayah Kota Semarang didominasi oleh mereka yang disebut sebagai “peranakan” (keturunan etnis Cina) menjadi refleksi nyata dari interaksi multi etnis yang telah berjalan sepanjang sejarah perkembangan kota.

Akulturasi antara budaya Cina dan Jawa menjadi pengaruh dominan dalam pembentukan karakter budaya Semarang, yang terefleksikan dalam budaya kuliner seperti loempia (lumpia), kue moci, wingko babad, hingga lontong cap go meh. Dalam kesenian daerah, akulturasi antara budaya Jawa dan Cina (juga budaya Arab) juga dapat dilihat dari pertunjukan seni “Warak Ngendhog” yang merupakan makhluk fiktif berupa binatang berkepala singa (sebagai representasi etnis Cina), berleher panjang (Arab), serta bertubuh kambing (Jawa) yang diarak mengelilingi kota menjelang bulan Ramadhan. Dalam bidang arsitektur, komunitas peranakan yang mulanya bermukim di daerah Simongan, pada tahun 1741 direlokasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Gang Baru yang sekarang berada di kawasan Kota Lama (Pikiran Rakyat, 2016). Dari perpindahan permukiman tersebut, terdapat peninggalan arsitektur berupa Kuil Sam Poo Kong serta arsitektur bangunan bergaya Oriental di kawasan Gang Baru yang kini juga dikenal dengan nama Kampung Pecinan. Aktifitas di kawasan Pecinan ini masih mempertahankan nilai-nilai budaya Peranakan, sehingga menjadi atraksi wisata tersendiri bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman belanja dan kuliner tradisional Cina.

Selain Etnis Cina, Kota Semarang sebagai melting pot juga mempertemukan budaya Barat yang dibawa oleh pendudukan kolonial Belanda dengan budaya lokal. Meskipun demikian, jejak interaksi antar kedua budaya tersebut lebih bersifat asimilasi dibandingkan akulturasi. Hal ini dapat ditelusuri jejaknya dari segregasi antar ras yang diberlakukan oleh

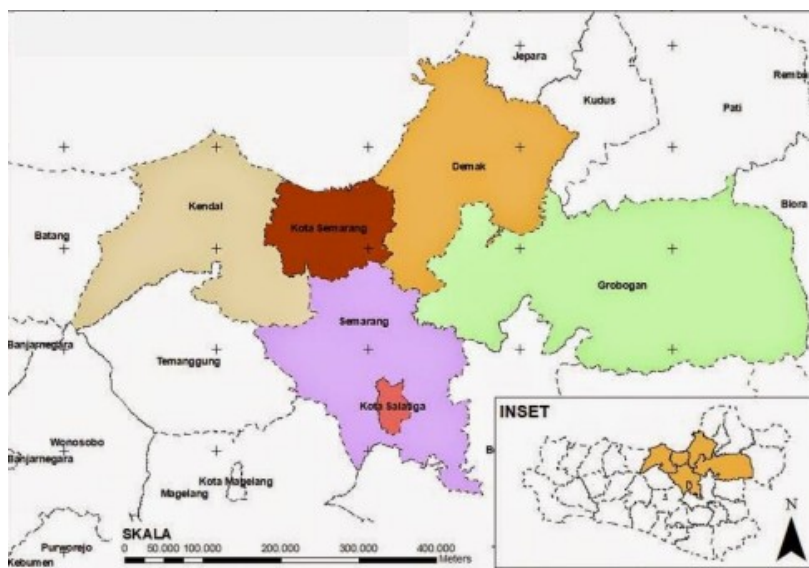
pemerintah kolonial antara bangsa kulit putih, pribumi, dan bangsa lainnya (termasuk di dalamnya Etnis Cina dan Arab), yang diciptakan dalam stratifikasi sosial masyarakat untuk membatasi interaksi antar kelompok. Pembatasan itu sendiri dimaksudkan untuk menjaga kemurnian budaya kolonial yang pada masa itu berfungsi sebagai instrumen hegemoni. Fungsi yang demikian dapat dilihat dari digunakannya gaya-gaya arsitektur Belanda dalam bangunan-bangunan simbol kekuasaan mulai dari rumah pejabat kolonial, gedung pemerintahan hingga gereja. Tidak adanya pembauran budaya di level akar rumput menjadikan kedua budaya tidak mengalami akulturasi, sehingga ketika pendudukan kolonial berakhir, tidak ada nilai-nilai budaya Barat yang tertinggal dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa asimilasi dan akulturasi yang hanya mungkin terjadi karena faktor geografis tersebut telah membentuk ciri budaya lokal yang membedakannya, termasuk dengan wilayah sekitar yang nantinya dikenal sebagai hinterland Kota Semarang. Proses budaya yang terjadi telah mempengaruhi tangible maupun intangible culture yang berkembang, yang nantinya mampu menjadi salah satu modalitas sosial-budaya dalam paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain dalam konteks mempromosikan Kota Semarang di level global. Modalitas sosial-budaya yang merupakan nilai-nilai budaya ini nantinya mampu menjadi kemasan romantisme atas modalitas ekonomi, yang merefleksikan nilai-nilai komersial.

Seperti unsur sosial-budaya yang dipengaruhi perkembangannya oleh kondisi geografis, modalitas ekonomi lokal Kota Semarang juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, tidak hanya terkait tipologi yang mempengaruhi tipe aktifitas ekonomi yang dapat dijalankan, tetapi juga persebaran demografi yang nantinya mendorong perubahan strategi pengembangan kota dengan mengintegrasikan wilayah-wilayah sekitarnya yang termasuk dalam hinterland Kota Semarang.

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,67 km<sup>2</sup> secara administratif terbagi menjadi sedikitnya 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak; sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang; dan sebelah utara dibatasi dengan Laut Jawa. Secara astronomis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara 6°50' - 7°10' LS dan garis 109°35' - 110°50' BT. Berikut ini adalah gambaran peta Kota Semarang:

Gambar 2.0 Peta Kota Semarang dan Sekitarnya



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2015

Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Semarang di sebelah selatan; Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur; dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016, Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki posisi geostrategis, karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang sedikitnya terdiri dari empat simpul gerbang, yaitu koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis, seperti Magelang, Surakarta, yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak atau Grobogan; dan koridor Barat menuju Kabupaten Kendal.

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk hampir mencapai 1,6 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti Jawa, Chinese dan Arab, dengan luas wilayah sebesar 373,80 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dalam hal perkembangan terkait kependudukan ini, dapat dikatakan relatif stabil dalam periode waktu selama 3 tahun terakhir dari tahun 2015.

Kota Semarang juga memiliki berbagai bangunan yang bernilai historis. Bangunan-bangunan bernilai historis tersebut memiliki beragam latar budaya dan religius. Keberagaman tersebut berkembang dengan selaras di Kota Semarang sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan-bangunan tersebut antara lain adalah Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Kauman, Masjid Menara (Masjid Layur), Gereja Blenduk (Gereja Immanuel),

Kelenteng Gedung Batu (Sam Poo Kong), Pagoda Avalokitesvara, Goa Kreo, Taman Lele, Simpang Lima, Chinese Town (Pecinan), Kebun Binatang Wonosari, dan Kota Lama. Selain itu berbagai kesenian dan festival seperti dhugdheran yang diselenggarakan setiap Bulan Ramadan dan Semarang Night Carnival sebagai rangkaian perayaan HUT Kota Semarang.

Kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan melakukan revitalisasi terhadap objek-objek wisata yang mengangkat budaya lokal, misalnya seperti Kelenteng Sam Poo Kong, Kawasan Gang Baru, Kawasan Kota Lama, Gedung Lawang Sewu, hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Selain revitalisasi, pemerintah juga berupaya menghidupkan kesenian lokal melalui festival yang diadakan, dua di antaranya adalah festival Masjid Agung Jawa Tengah dan festival Sam Poo Kong (Kementerian Sekretariat Negara, 2007). Dengan menggerakkan kehidupan ekonomi-pariwisata lokal, selanjutnya pemerintah menegaskan misi dibentuknya program SPA dengan diadakannya forum bisnis pengusaha yang bertujuan untuk mempromosikan Kota Semarang (dan sekitarnya) kepada investor melalui acara tahunan yang dinamakan sebagai Semarang Business Forum (Sem'Biz).

Namun, penelitian ini berfokus pada revitalisasi Kota Lama Semarang yang memiliki nilai historis tinggi namun masih dibutuhkan revitalisasi pengelolaan Kota Lama sehingga dapat menjadi daya tarik Pariwisata Kota Semarang.

## **2.1 Kondisi Terakhir dari Kota Lama Semarang**

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan juga merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang termasuk kawasan yang bersejarah. Salah satu sudut Kota Semarang yang saat ini gencar dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memikat wisatawan adalah Kota Lama Semarang (kompas.com, 2018). Kawasan Kota Lama Semarang atau sering disebut dengan “The Little Netherland” merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi karena memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi mengingat banyaknya peninggalan penjajahan Belanda dan banyak bangunan-bangunan yang masih kokoh hingga saat ini seperti GPIB (Gereja Protestan Indonesia bagian Barat), Stasiun Tawang, dan masih banyak bangunan lainnya yang masih menjadi objek pariwisata. Hingga sekarang, banyaknya gedung bersejarah yang ada di kawasan Kota Lama sendiri merupakan hasil dari pemukiman orang Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang mempunyai mata pencaharian utama sebagai pedagang. Tidak hanya itu, infrastruktur yang ada di kawasan Kota Lama Semarang juga sudah sangat berkembang. Menurut data pada Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011, total bangunan yang ada di kawasan Kota Lama Semarang mencapai 274 unit yang terdiri dari bangunan perumahan dan juga perkantoran.

Saat ini, kawasan Kota Lama Semarang tengah diusulkan menjadi kota warisan budaya dunia UNESCO (Kompas, 2017).

Dengan adanya usulan dari UNESCO sendiri untuk membuat Kota Lama Semarang sebagai kota warisan budaya, Pemerintah Kota Semarang terus melakukan revitalisasi dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata untuk mewujudkan kawasan Kota Lama Semarang sebagai “*World Heritage 2020*”. Hal ini disebabkan pula karena terjadinya peningkatan jumlah wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang melalui Bandara Ahmad Yani. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2015), jumlah wisatawan asing yang melalui pintu masuk Bandara Ahmad Yani pada bulan Pebruari 2015 mencapai 869 orang. Pada bulan yang sama di tahun berikutnya, yakni Pebruari 2016, jumlah wisatawan asing yang masuk melalui Bandara Ahmad Yani mencapai 1.080 orang (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016). Secara akumulatif, jumlah wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang melalui Bandara Ahmad Yani pada tahun 2015 mencapai 14.279 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016, menjadi 17.079 orang. Pada akhir tahun 2017. BPS Provinsi Jawa Tengah (2017) kembali mengeluarkan Berita Resmi Statistik yang membahas perkembangan pariwisata di Kota Semarang bulan Januari hingga Nopember 2017, yang jika diakumulasi mencapai 22.951 orang . Jumlah tersebut membuktikan bahwa wisatawan asing yang masuk ke Kota Semarang terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

Ketika Kota Lama menjadi Situs Warisan Pusaka UNESCO sebagaimana ditargetkan oleh Pemerintah Kota Semarang, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Indonesia khususnya Semarang sendiri dalam hal promosi berskala internasional. Namun, apakah masyarakat di Kota Semarang khususnya di kawasan Kota Lama siap untuk mendukung hal tersebut? Dari mulai tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha melakukan revitalisasi untuk menjadikan Kota Lama sebagai ikon Kota Semarang. Bahkan, Pemkot Semarang mengalokasikan Rp.69 miliar (Kompas, 2016) untuk perbaikan infrastuktur Kota Lama seperti perbaikan drainase, mengingat kawasan Kota Lama yang sering terkena banjir apabila terjadi hujan deras.

Tidak hanya perbaikan drainase, perbaikan jalan yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang juga sudah dilakukan. Dua jalan, yakni Jalan Merak dan Jalan Mpu Tantular sudah diperbaiki dan diteruskan ke jalan lain. Namun, masyarakat Semarang sendiri sepertinya masih kurang berkontribusi dalam pelestarian di Kawasan Kota Lama Semarang itu sendiri. Sejak tahun 2003, Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Lama. Namun, pada realita yang ada, pelaksanaannya kurang bisa diterapkan. Sebagai contohnya larangan truk yang berbobot lebih

dari 3 ton untuk melintas. Nyatanya masih banyak truk yang overweight berlalu-lalang pada siang dan malam. Pada tahun 2017, total anggaran yang diperlukan untuk Kota Lama Semarang adalah sebesar Rp.156 miliar (Kompas, 2017). Sejumlah penataan sudah dilakukan seperti perbaikan jalan dan drainase yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Semarang terutama melalui wisata. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR juga sudah membuat fasilitas tambahan di kawasan Kota Lama seperti tempat duduk panjang, tempat sampah, lampu penerangan jalan utama, dan trotoar

Dalam segi akomodasi dan infrastruktur, kawasan Kota Lama Semarang sebenarnya sudah mulai dibenahi menjadi objek tujuan wisata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang merupakan peninggalan Belanda, dan juga dibangunnya hotel hotel berbintang di daerah Kota Lama. Tidak hanya itu, transportasi juga sudah sangat berkembang. Penerbangan menuju Semarang bisa dijangkau dari sejumlah kota besar, bahkan penerbangan internasional seperti dari Malaysia dan Singapura. Kota Lama Semarang, mempunyai potensi yang besar untuk menjadi Kawasan Wisata Semarang, mengingat kawasan tersebut adalah wilayah bekas benteng pertahanan kolonial Belanda, dengan gereja Blenduk sebagai obyek yang banyak dikunjungi wisatawan.

Permasalahan utama yang ada di Kawasan Kota Lama ini adalah terkait kepemilikan lahan. Lahan lahan yang diduduki oleh bangunan yang ada di Kawasan Kota Lama ini umumnya merupakan milik individu. Kepemilikan atas lahan pada Kawasan Kota Lama menjadikan langkah untuk melakukan konservasi di Kota Lama semakin terhambat. Klaim lahan pada Kota Lama ini umumnya terjadi karena sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan merupakan warisan turun temurun yang menjadikan pengelolaan atas tanah dan bangunannya menjadi terhambat, sehingga pemerintah Kota Semarang yang akan melakukan pembenahan terhadap Kawasan Kota Lama juga ikut terhambat.

Bangunan-bangunan di Kawasan Kota Lama umumnya dimanfaatkan sebagai gudang-gudang milik pengusaha yang menjadi pemilik sah atas tanah di Kota Lama. Pemanfaatan bangunan menjadi pergudangan ini memberikan kesan kumuh dan tidak aman untuk kawasan Kota Lama. Hal ini dikarenakan aktivitas bongkar muat barang pada gudang yang tidak rutin dan bersifat periodik membuat pemanfaatan bangunan sangat minim aktivitas. Hal ini menjadikan kota Lama terkesan sangat sepi pada malam hari. Hanya beberapa bangunan yang digunakan sebagai aktivitas publik, seperti tempat makan dan tempat peribadatan. Kualitas lingkungan yang buruk di Kota Lama juga menjadi salah satu permasalahan rumit bagi pemerintah Kota Semarang, serta keamanan kawasan Kota Lama



sebagai salah satu tujuan wisatawan juga merupakan permasalahan lain yang harus diselesaikan.

Kualitas lingkungan ini menyangkut dengan permasalahan banjir yang tidak kunjung usai di Kota Lama. Pada tahun 2013, pesisir Kota Semarang yang mengalami banjir hebat berdampak kepada Kota Lama. Aliran Kali Mberok dan Polder Tawang yang berada di Kawasan Kota Lama seharusnya menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengoptimalkan kembali aliran Kali Mberok dan pompa pada Polder Tawang, dapat dijadikan salah satu solusi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan banjir di kawasan Kota Lama. Permasalahan lain yaitu berkurangnya aktivitas perkotaan, yang semakin lama akan menyebabkan lumpuhnya kota lama. Beberapa hal yang menjadi penyebab berkurangnya aktivitas di Kota Lama Semarang antara lain adalah kondisi lingkungan di kawasan tersebut yang kurang terawat. Hal itu mengakibatkan rusaknya bangunan-bangunan dan lingkungan di Kota Lama Semarang. Selain itu, adanya pergeseran bentuk kolonial yang mendorong masyarakat dan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembangunan yang cenderung menuju konsep kota modern menyebabkan kota-kota lama ditinggalkan dan kurang mendapat perhatian.

## **2.2 Sejarah Kota Lama Semarang**

Pembangunan dari Kota Lama Semarang dimulai pada sekitar abad 18. Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan colonial Belanda, dibangun pula benteng sebagai pusat militer. Awalnya kawasan ini dikenal dengan nama Kota Benteng karena yang dibangun pertama kali adalah sebuah benteng yang bernama bernama *Vijfhoek* yang digunakan sebagai tempat tinggal dan pusat militer oleh warga Belanda. Oleh sebab itu, sebutan Kota Lama merupakan bagian dari bekas Belanda yang dibatasi oleh benteng de *Vijfhoek* (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTBL Kawasan Kota Lama). Kemudian, pemukiman Belanda mulai bertumbuh di sisi Timur benteng *Vijfhoek*. Banyak perumahan, gereja dan bangunan perkantoran yang dibangun di pemukiman ini. Pemukiman ini merupakan cikal bakal dari Kota Lama Semarang itu sendiri. Istilah benteng digunakan untuk menyebut kota Semarang perdana yang berada di dalam benteng kota termasuk daerah penyangga disekelilingnya. Menurut para arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta menuturkan bahwa berdasarkan kumpulan sumber pustaka dan dokumen berupa gambar-gambar peta Semarang kuna beserta analisis yang dilakukan menunjukkan setidaknya rentang perjalanan Kota Lama Semarang dapat dibagi dalam tiga fase besar (Sugeng Riyanto, 2009), yaitu:

### **1. Fase I (1677 – 1741)**

Fase I (de Vijfhoek van Samarangh), di kenal dengan Fase Prabenteng Kota, dalam fase tersebut apabila dipersempit di pulau Jawa bagian tengah akan terangkai cerita sejarah antara lain: perjanjian antara VOC dengan Amangkurat II pada tahun 1677, yang berisi pemberian hak kepada VOC untuk mendirikan benteng pertahanan di setiap pelabuhan di wilayah kekuasaan Mataram, pemberontakan Trunojoyo kepada Mataram sampai perpindahan benteng dan pusat kekuatan VOC dari Jepara ke Semarang.

### **2. Fase II (1756 – 1824)**

Fase II (Benteng Kota) merupakan fase hancurnya benteng de Vijfhoek diperkirakan antara tahun 1741-1756 karena pada tahun 1756 sudah berdiri benteng kota. Selama kurun waktu kurang lebih 68 tahun sebelum benteng kota dihancurkan sendiri oleh VOC pada tahun 1824 nampaknya cikal bakal kota Semarang tumbuh dan berkembang pesat hingga menyambung jalan pos Anyer – Panarukan yang dibangun pada tahun 1808 sampai 1811 oleh Daendels melewati kota Semarang. Karena pertumbuhan kota yang cepat dan memerlukan komponen kota yang mendukung hingga akhirnya demi perkembangan kota maka dihancurkanlah benteng kota pada tahun 1824.

### **3. Fase III (1824 – 1866).**

Fase III (Pasca Benteng Kota) merupakan fase yang lebih jelas, bagaimana upaya Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kota Semarang. Dinamika dan potret sebuah kota antara lain terlihat pada kegiatan ekonomi; prasarana untuk transportasi air dan darat mulai dikisahkan dalam sumber-sumber tertulis. Di era ini bisa tergambarkan bahwa kota Semarang yang secara geografis memiliki pantai, dataran rendah dan dataran tinggi terus tumbuh dan berkembang hingga era pra kemerdekaan. Dirintisnya jalur transportasi kereta api pertama, yakni jalur Semarang – Tanggung sepanjang 25 km yang perletakan batu pertamanya dilakukan oleh gubernur jenderal Baron Sloet van de Beele pada tanggal 17 Juni 1864 adalah satu contoh bahwa Semarang adalah kota pilihan yang amat diperhitungkan dari berbagai aspek. Sudah dapat dipastikan berkembangnya ekonomi pada masa itu menggerakkan sektor lain termasuk permukiman dan kota.

### **2.3 Upaya yang Sudah Dilakukan Pemerintah Kota Semarang**

Dalam meningkatkan ecotourism Kota Lama Semarang, sudah ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat menjadikan kawasan Kota Lama Semarang dapat

menjadi suatu kawasan yang memiliki nilai pariwisata. Untuk mengembangkan kehidupan kultural di Kota Lama Semarang, telah direncanakan program seperti revitalisasi bangunan kuno peninggalan Belanda yang tadinya masih berdiri namun dengan kondisi yang sangat tidak layak. Pemerintah Kota Semarang juga mengembangkan museum yang berisikan tentang Kota Lama, menentukan Landmark kota dan melakukan peningkatan terhadap benda hasil budaya dan juga kerajinan serta masakan khas.

Tidak hanya dalam segi infrastruktur, Pemerintah Kota Semarang juga sudah berusaha dalam menghidupkan usaha usaha dan juga melakukan peningkatan di sektor entertainment. Hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pengembangan UMKM, adanya pedagang di sekitar kawasan Kota Lama dan juga menyediakan kegiatan yang dapat diikuti masyarakat Kota Semarang seperti festival yang bertemakan budaya sehingga dapat mempromosikan kesenian-kesenian Kota Semarang. Bahkan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konservasi pada kawasan Kota Lama Semarang, dengan mengacu pada Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Dati II Semarang No.646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Konservasi Bersejarah di Wilayah Dati II Semarang, Perda No.8/2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama, dan kemudian Peraturan Wali Kota No.12/2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, Perwal No.37/2011 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perda No.14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Upaya pemerintah tersebut diantaranya akan mengkonservasi sebanyak 105 bangunan peninggalan zaman Belanda di kawasan Kota Lama Semarang, sebagai bentuk dari penataan agar bisa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Dengan total bangunan yang ada di kawasan Kota Lama sebanyak 245 bangunan, dengan perincian 177 bangunan milik pribadi dan 68 bangunan milik perusahaan, baik negeri maupun swasta, dan yang akan dikonservasi sebanyak 105 bangunan. Bangunan yang akan dikonservasi tersebut, diantaranya adalah 31 bangunan di Jalan Letjen Soeprapto, enam bangunan di Jalan Mpu Tantular, dan tujuh bangunan di Jalan Merak.

Tahap pelestarian kawasan kota lama Semarang	
Tahap I	Tahap II
Perencanaan Konsep	Pelestarian dan Pemeliharaan

1. Tahap I ( PERENCANAAN KONSEP)

Perencanaan konsep dilakukan sebagai dasar dari pemerintah untuk melakukan pengembangan maupun pelestarian dan pemeliharaan. Tahap ini berisikan peraturan-peraturan yang menjadi acuan bagi setiap pihak untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan ekoturisme di kawasan Kota Lama Semarang. Peraturan mengenai pelestarian dan konservasi serta pengembangan Kota Lama Semarang antara lain:

- a UU No 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya dan konsep-konsep pelestarian pada umumnya
- b Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor I Tahun 1999
- c Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999
- d Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999
- e Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003

2. Tahap II ( PELESTARIAN DAN PEMELIHARAAN)

Tahap ini merupakan realisasi dari tahap sebelumnya yaitu tahap perencanaan, dimana segala peraturan yang ada akan direalisasikan pada usaha-usaha:

- a Dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BP2KL) untuk mengelola, mengembangkan, mengoptimalkan potensi Kota Lama Semarang
- b Terdapat 150 bangunan Kota Lama Semarang yang akan ataupun telah dikonservasi seperti Gereja Blenduk, Tekodeko, Spiegel
- c Pada tahun 2015 kawasan Kota Lama Semarang masuk dalam daftar sementara Cultural World Heritage UNESCO
- d Direncanakan pada tahun 2020 kawasan Kota Lama Semarang akan masuk dalam daftar tetap Cultural World Heritage UNESCO
- e Diadakannya Festival\_Kota Lama Semarang yang menjadi program rutin sejak tahun 2012 dengan tema yang berbeda setiap tahunnya.

## **BAB III**

### **ECOTOURISM SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN**

#### **3.1 Ecotourism sebagai Strategi Pembangunan yang Tepat**

Mulai disadari bahwa diperlukan adanya strategi yang menghubungkan antara wisata dan konservasi alam serta budaya. Diawali dengan adanya The Pacific Asia Travel Assosiation yang mengadakan konferensi mengenai strategi pembangunan dengan mempertimbangkan sekor wisata dan lingkungan yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan banyak gerakan yang sama seperti Deklarasi Manila dan UNEP. Menurut Goodwin (1997) kegiatan ekoturisme baik secara langsung atau tidak, memiliki peran dalam upaya melindungi dan mengelola habitat alam dan spesies yang ada di dalamnya. Penjelasan tersebut dijabarkan dengan tiga keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekoturisme.

Pertama, ekoturisme merupakan cara yang paling benar dan efektif untuk menghasilkan keuntungan sekaligus mengelola dan melindungi destinasi wisata. Dengan demikian ekoturisme merupakan strategi investasi jangka panjang untuk keberlangsungan destinasi wisata tersebut. Kedua, kegiatan ekoturisme memungkinkan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan destinasi wisata. Masyarakat memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kegiatan ekoturisme sehingga dibutuhkan terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak pengelola dan masyarakat sekitar. Diperlukan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan pengelolaan destinasi wisata. Ketiga, kegiatan ekoturisme secara langsung maupun tidak akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan destinasi wisata bagi para turis. Para turis tersebut memiliki peran sebagai penyumbang suara/aspirasi, penyumbang dana serta pemimpin potensial yang dapat mewujudkan kegiatan ekoturisme.

Dengan demikian terdapat aspek penting yang terdapat dalam ekoturisme yang pertama yaitu konservasi yang merupakan tanggung jawab dalam pemeliharaan destinasi wisata. Konservasi dan pemeliharaan terhadap destinasi wisata merupakan investi jangka panjang yang dapat membuat destinasi wisata bertahan lama. Kedua, terjalinnya hubungan yang harmonis antara aktivitas wisata, alam dan budaya, serta masyarakat sekitar. Hubungan harmonis yang terjalin memastikan bahwa seluruh strategi yang direncanakan akan terlaksana dengan efektif dan baik. Ketiga, adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Dengan segala strategi dan harapan yang ingin dicapai maka yang menjadi tujuan adalah terjadinya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Apabila konsep ekoturisme juga diterapkan pada kawasan Kota Lama Semarang maka segala keuntungan diatas akan didapatkan. Mulai dari konservasi dan perlindungan Kota Lama, masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari konservasi tersebut, hingga kesadaran yang tinggi dari para wisatawan untuk ikut berkontribusi menjaga dan melestarikan. Keuntungan yang didapat merupakan keuntungan jangka panjang yang akan terus berkembang. Dikarenakan apabila konservasi yang dilakukan baik maka masyarakat sekitarpun akan mendapat manfaat dari para wisatawan yang datang dan puas dengan Kota Lama, sehingga dari kepuasan tersebut akan menjadikan para wisatawan juga menjadi agen untuk melestarikan Kota Lama. Berdasarkan segala keuntungan yang didapat dari ekoturisme, tidak dapat dipungkiri bahwa ekoturisme hadir sebagai strategi pembangunan yang paling tepat dalam mengembangkan sektor pariwisata.

### **3.2 Faktor-faktor yang Mendukung Ecotourism**

Menurut Patterson (2002), ada beberapa karakteristik ecotourism. Ecotourism Mempunyai dampak yang rendah terhadap sumber daya alam dan teknik rekreasi di kawasan lindung. Melibatkan pemangku kepentingan (individu, masyarakat, wisatawan, operator tur dan lembaga pemerintah) dalam tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan. Melimitasi kunjungan ke area, baik dengan membatasi ukuran kelompok dan / atau dengan jumlah kelompok yang dibawa ke suatu area dalam satu musim. , mengarahkan pelanggan di wilayah yang akan dikunjungi dan juga menghormati privasi dan budaya masyarakat setempat.

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat local merupakan salah satu komponen berkelanjutan pada umumnya dan secara khusus bari ecotourism itu sendiri (Drake, 1991). Implementasi dari ecotourism ini sendiri sudah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat local dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini termasuk lapangan pekerjaan, pendapatan, perbaikan infrastruktur dan meningkatkan kepeduluan terhadap budaya dan lingkungan. Namun, untuk mendapatkan dampak dampak positif dari ecotourism ini, maka diperlukan kerjasama dari pemerintah, organisasi dan masyarakat local sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki perang yang paling utama dalam menentukan kesuksesan dari konsep ecotourism itu sendiri. Pemerintah dapat melakukan perbaikan sektor dengan menggunakan strategi ramah lingkungan dan membuat inovasi baru untuk bangunan yang belum tersentuh. Salah satu contoh bangunan yang telah direvitalisasi dan hingga kini telah menjadi tempat wisata adalah Spiegel. Tetapi pada dasarnya, revitalisasi bangunan tua di kota tua Semarang sulit karena terhambat oleh kepemilikan

bangunan lama. Sebagian besar bangunan di daerah Kota Lama tidak diketahui oleh pemiliknya, sehingga ada kesulitan bagi pemerintah kota Semarang untuk memperbaharui bangunan. Namun, jika pemerintah telah mampu merevitalisasi bangunan, dapat dipastikan bahwa bangunan yang ada akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Lama Semarang. Perbaikan sektor pariwisata tidak harus dilakukan dengan membangun gedung baru, tetapi dapat dilakukan dengan memperbaharui bangunan lama dan menambah nilai ekonomi ke bangunan sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berlebihan dan tetap meningkatkan nilai pariwisata daerah Kota Lama.

Organisasi berskala internasional seperti juga memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi pariwisata di Semarang, sebagai contohnya AIESEC. Sebagai organisasi yang mendatangkan wisatawan asing ke Semarang, maka diperlukan pengenalan terhadap kearifan local yang ada di Semarang. Mengarahkan wisatawan ke daerah yang akan dikunjungi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai pariwisata di Kota Lama. Menurut data yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa banyak wisatawan dari negara lokal dan asing datang ke Semarang. Para wisatawan ini tentu tidak tahu kemana mereka harus berkunjung selama berada di Semarang. Pemerintah kota harus berusaha bekerjasama dengan organisasi untuk mempromosikan kawasan Kota Lama secara intensif sehingga dapat menjadi salah satu pilihan pariwisata wisatawan yang berkunjung ke Semarang.

Faktor pendukung yang terakhir dan memiliki peran yang cukup signifikan adalah dari masyarakat itu sendiri. Meskipun pembangunan di Kota Lama sudah dilakukan dengan baik, akan percuma apabila kesiapan masyarakat di sekitar Kota Lama masih kurang dalam membantu pemerintah dalam mengolah sumber daya yang ada di Kota Lama itu sendiri. Pemerintah juga harus mampu memberdayakan masyarakat lokal yang berada di kawasan kota tua sehingga mereka dapat menjadi pemandu bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan kota tua guna memberikan rekomendasi tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai kawasan pariwisata di kota Tua. Dengan demikian, meningkatkan nilai pariwisata di kota tua dapat dilakukan dan orang-orang di sekitar kawasan Kota Lama dapat berpartisipasi aktif dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat mereka. Hal ini juga berarti masyarakat yang ada di sekitar Kota Lama harus memiliki jiwa jiwa *entrepreneurship* untuk memanfaatkan hasil dari revitalisasi yang sudah dilakukan pemerintah sehingga pembangunan yang sudah dilakukan tidak sia sia dan pemerintah serta masyarakat sekitar

dapat bekerjasama dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kota Lama dengan menggunakan konsep *ecotourism*.

### **3.3 Pengembangan Masyarakat**

Terdapat lima unsur dalam pelaksanaan ekoturisme yaitu pendidikan (*Education*) dan interpretasi (*interpretation*), Konservasi (*Conservation*), Perlindungan atau Pembelaan (*Advocacy*), Keterlibatan komunitas setempat (*Community Involvement*), Pengawasan (*Monitoring*) (Yoeti, 2000: 40).

#### **a. Pendidikan (*Education*) dan interpretasi (*interpretation*)**

Aspek pendidikan merupakan bagian utama dalam mengelola ekowisata karena membawa misi sosial untuk menyadarkan keberadaan manusia, lingkungan, dan akibat yang mungkin ditimbulkan bila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam manajemen pemberdayaan lingkungan. Misi tersebut tidak mudah karena untuk menjabarkan dalam satu paket wisata seringkali bentrok dengan kepentingan antara perhitungan ekonomi dan terjebak dalam misi pendidikan konservatif yang kaku (Yoeti, 2000: 40). Wisatawan ekowisata akan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai ekosistem, keunikan biologi dan kehidupan sosial di kawasan yang dikunjungi, sehingga wisatawan tersebut meningkat kesadarannya untuk ikut melestarikan alam. Interpretasi/penafsiran terhadap lingkungan serta pendidikan terhadap wisatawan tentang lingkungan yang dikunjungi adalah unsur-unsur yang menentukan keberhasilan ekowisata (*Department of Tourism, Small Business and Industry*, 1997: 7). Hal ini dapat dituangkan dalam papan-papan interpretasi pada setiap jalur, brosur informasi pada pusat pengunjung dan video-video (Boo, 1995: 22).

#### **b. Konservasi (*Conservation*)**

Membangun sebuah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan, dimana keanekaragaman hayati menjadi isu penting di dalamnya sangat diperlukan. Banyak ahli berpendapat bahwa membangun kesadaran konservasi lewat pendidikan informal dapat dilakukan dengan jasa sektor wisata (Honey, 1999: 44). Gosling (1999: 303), Honey (1999: 44), Wunder (2000: 465-479) Dharmaratne et al (2000: 590) mengatakan bahwa jika sektor wisata diatur secara khusus dapat membantu pembiayaan konservasi lingkungan hidup. Terutama konservasi keanekaragaman hayati yang keadaannya semakin tertekan.

#### **c. Perlindungan atau Pembelaan (*Advocacy*)**



Seharusnya, prasarana yang dibuat hendaknya mampu memberikan nilai-nilai berwawasan lingkungan dan menggunakan bahan-bahan di sekitar obyek itu walaupun kelihatan sangat sederhana. Dengan cara itu, keaslian dapat dipertahankan karena dengan kesederhanaan itu masyarakat di sekitar kawasan mampu mengelola dan mempertahankan kelestarian alam dengan sendirinya tanpa mengada-ada (Yoeti, 2000: 40).

#### **d. Keterlibatan komunitas setempat (*Community Involvement*)**

Dalam pengelolaan kawasan ekowisata, peran serta masyarakat setempat tidak bisa diabaikan. Mereka lebih tahu dari pada pendatang yang punya proyek karena itu keterlibatan mereka dalam persiapan dan pengelolaan kawasan sangat diperlukan. Mereka lebih mengetahui dimana sumber mata air yang banyak, ahli tentang tanaman dan buah-buahan yang bisa dimakan untuk keperluan obat, tahu mengapa binatang pindah tempat pada waktu-waktu tertentu, sangat mengerti mengapa semut berbondongbondong, meninggalkan sarangnya, karena takut banjir yang segera datang. Salah satu faktor yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat adalah, terciptanya persepsi positif dari masyarakat, khususnya yang terkait dengan aspek nilai tambah yang mampu diberikan pariwisata kepada perekonomian masyarakat. Untuk itu kesadaran masyarakat perlu dibangkitkan melalui berbagai sosialisasi, serta ditindaklanjuti dengan upaya mempersiapkan masyarakat untuk menangkap peluang adanya pengembangan ekowisata.

#### **e. Pengawasan (*Monitoring*)**

Menurut Horwich, R..et all (1995: 176) ekowisata yang benar harus didasarkan atas sistem pandang yang mencakup di dalamnya prinsip berkesinambungan dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat di dalam areal-areal potensial untuk pengembangan ekowisata. Ekowisata harus dilihat sebagai suatu usaha bersama antara masyarakat setempat dan pengunjung dalam usaha melindungi lahan-lahan (*wildlands*) dan aset budaya dan biologi melalui dukungan terhadap pembangunan masyarakat setempat. Pembangunan masyarakat di sini berarti upaya memperkuat kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk mengontrol dan mengelola sumber daya yang sangat bervaluasi dengan cara-cara yang tidak hanya dapat melestarikan sumber daya akan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan kelompok tersebut secara sosial, budaya dan ekonomi. Dalam pengelolaan Ekowisata, diperlukan pengawasan (*monitoring*) yang berkesinambungan sehingga masalah integritas, loyalitas, atau kualitas dan kemampuan untuk mengelola akan sangat menentukan untuk mengurangi dampak yang timbul (Yoeti, 2000: 41).

Dari kelima unsur diatas dapat dilihat bahwa peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ekoturisme. Maka dari itu pengembangan ekoturisme dalam kawasan Kota Lama Semarang juga membutuhkan peran serta masyarakat yang kuat. Meskipun segala fasilitas dan konservasi Kota Lama telah dilakukan akan sia-sia tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Sedangkan menurut Sunarto (1994; 23) terdapat tiga syarat tumbuhnya peran serta yaitu: 1. ada kesempatan untuk ikut dalam pembangunan; 2. Ada kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan; 3. ada kemauan untuk berperan serta.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berinisiatif sendiri (mandiri) untuk meningkatkan potensi pariwisata dalam upaya mengembangkan ekowisata di daerah Kota Lama Semarang. Hal ini dibuktikan dengan jarangnyanya masyarakat untuk mengikuti event yang ada di Kota Lama ataupun melakukan kegiatan yang menunjang kegiatan ekowisata. Seperti pada saat event Festival Kota Lama Semarang, para wisatawan kebanyakan bukan masyarakat setempat. Meskipun terdapat bazaar UMKM tetapi tidak ada satupun pelaku UMKM yang merupakan masyarakat sekitar Kota Lama. Seharusnya adanya acara Festival Kota Lama ini menjadi peluang dan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan.

Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat serta kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan menggambarkan bahwa masyarakat juga akan enggan dan tidak sadar untuk melakukan kegiatan konservasi maupun perlindungan kawasan Kota Lama Semarang. Keenggan dan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan Kota Lama Semarang juga dibenarkan oleh Sekretaris Dinas dan Pariwisata Kota Semarang, Kasturi, yang menyatakan bahwa banyak lampu penerang jalan di sekitar Taman Sri Gunting yang hilang karena dicuri, tanaman di Taman Sri Gunting rusak bahkan hilang serta rusaknya fasilitas-fasilitas lain yang kemungkinan besar diakibatkan oleh masyarakat sekitar. Padahal peran masyarakat selain sebagai agen yang melestarikan juga sebagai agen controlling yang mengontrol dan mengawasi bagaimana pelaksanaan pengembangan ekoturisme di Kota Lama Semarang.

Keenggan dan ketidaksadaran masyarakat untuk peduli dan melestarikan Kota Lama Semarang membuat fasilitas yang diberikan pemerintah tidak terjaga dengan baik dan rusak. Dengan keadaan seperti itu, membuat para wisatawan tidak betah atau mungkin tidak akan kembali lagi mengunjungi Kota Lama Semarang. Hal tersebut akan membuat Kota Lama Semarang terbengkalai dan tidak ada pemasukan dan perkembangan ekonomi sehingga destinasi wisata tidak akan bertahan lama.

Keadaan yang terjadi bukan merupakan kesalahan yang berasal dari salah satu pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Tetapi perlu disadari bersama bahwa pelaksanaan ekoturisme merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi. Perlunya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu, perlu adanya penekanan pada salah satu unsur ekoturisme yaitu pendidikan (*Education*) dan interpretasi (*interpretation*). Sebelum pelaksanaan konservasi serta pemanfaatan ekonomi dari destinasi wisata, diperlukan adanya pendidikan dan interpretasi mengenai sejarah dan kebudayaan mengenai Kota Lama Semarang itu sendiri. Hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengedukasi dan memberikan penjelasan yang baik mengenai Kota Lama Semarang. Pemerintah juga dapat menggandeng local community yang ada seperti AIESEC untuk mengedukasi dan memberikan interpretasi tersebut. Tujuan dilaksanakannya proses edukasi dan interpretasi tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana pentingnya untuk melestarikan Kota Lama Semarang sehingga masyarakatpun akan mendapat manfaat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan, ternyata Kota Semarang secara khusus wilayah Kota Lama memiliki banyak potensi yang bernilai ekonomi khususnya di bidang pariwisata. Namun, penelitian ini melihat masih kurangnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi dan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di Kota Lama sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan dilakukannya banyak revitalisasi di wilayah Kota Lama, diperlukan suatu konsep yang dapat digunakan tidak hanya untuk meningkatkan sector pariwisata di wilayah Kota Lama, tetapi juga dapat digunakan pemerintah daerah untuk mencapai *Sustainable Development*. Penelitian ini menyarankan penggunaan konsep *ecotourism* yang mana *ecotourism* merupakan cara yang paling benar dan efektif untuk menghasilkan keuntungan sekaligus mengelola dan melindungi destinasi wisata. Dengan demikian ekoturisme merupakan strategi investasi jangka panjang untuk keberlangsungan destinasi wisata tersebut. Kedua, kegiatan ekoturisme memungkinkan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan destinasi wisata. Di lain sisi, kontribusi dari masyarakat di sekitar kawasan Kota Lama Semarang akan sangat berdampak dalam suksesnya implementasi dari konsep *ecotourism* itu sendiri. Masyarakat di sekitar kawasan Kota Lama Semarang harus memiliki *sense of belonging* dengan wilayah tersebut dan memiliki keinginan untuk turut andil dalam melakukan dan menyukseskan pembangunan di Kota Lama. Sehingga dibutuhkan kolaborasi secara nyata baik dari pemerintah dalam melakukan revitalisasi dan memberikan fasilitas fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang Kota Lama sebagai wilayah pariwisata, dan juga dari masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Lama untuk dapat memanfaatkan hasil dari revitalisasi dan membantu pemerintah dalam meningkatkan sector pariwisata dari Kota Lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2012: *Selayang Pandang Kota Semarang tahun 2012*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2013: *LKPJ Walikota Semarang Tahun Anggaran 2013*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2014: *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- \_\_\_\_\_. *Profil Kabupaten/Kota*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- \_\_\_\_\_. *Jumlah Pekerja di Kota Semarang 2012-2014*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8>.
- \_\_\_\_\_. *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 21 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>.
- \_\_\_\_\_. *Realisasi Volume Ekspor Non Migas Menurut Sektor*. Diakses 22 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/27>.
- A. Epstein. Richard, 2013: "Direct Democracy: GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE?" dalam *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 34. [http://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/2013/10/34\\_3\\_819\\_Epstein.pdf](http://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/2013/10/34_3_819_Epstein.pdf)
- A. Garner, Bryan (ed), 1999: *Black's Law Dictionary seventh Edition*, St. Paul Minn, New York.
- Alamsyah, Anidu dkk, 2014: "Implementasi Kerjasama Sister Schools Sma Negeri 3 Malang-River Valley High School Dalam Perspektif Diplomasi Publik, dalam [http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu\\_Alamsyah\\_Imam\\_Hanafi\\_and\\_Mangku\\_Purnomo\\_41\\_%281%29\\_July\\_2014.pdf](http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu_Alamsyah_Imam_Hanafi_and_Mangku_Purnomo_41_%281%29_July_2014.pdf).
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. n.d. *Banyaknya Angkatan Kerja di Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 23 November 2016. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/6>.
- Badan Pusat Statistik, 2016: *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses pada 21 November 2016 <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>
- Barston, R. P, 2006: "The Changing Nature of Diplomacy" dalam *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education.
- Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY, 2006: "Bunga Rampai: Kerjasama Luar Negeri".
- Boo, Elizabeth., 1995. *Pelaksanaan Ekoturisme untuk Kawasan-Kawasan yang dilindungi*. Ekoturisme : Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola. Dalam Lindberg, Kreg and Hawkins, Donald. The Ecotourism Society North Bennington, Vermont
- Conyers, D, 1984: "Decentralization and Development: a Review of the Literature", *Public Administration and Development*, Vol. 4.
- Ekins, Richard, 2009: "A Government for the People: The value of representative" dalam [http://www.maxim.org.nz/site/Default Site/filesystem/documents/GP\\_Richard\\_Ekins oct\\_09.pdf](http://www.maxim.org.nz/site/Default Site/filesystem/documents/GP_Richard_Ekins_oct_09.pdf).
- Fathun, L. M., 2016: Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Fathun, L. M., 2016: Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Goodwin, H. 1997. Ekowisata Terrestrial. Di dalam: Myra P.Gunawan, editor. Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan. Prosiding Pelatihan dan Lokakarya. Bandung:ITB
- Gossiling, S. 1999. *Ecotourism: A Means to Safeguard Biodiversity and Ecosystem Function*. *Ecological Economics* (29) : 303-320.

- Hadi, Umar., 2007: “*Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional*”, Tabloid Diplomasi Edisi Desember 2007.  
<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuuue/55-desember-2007/535-diplomasi-publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html>. Diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015.
- Held, D., dkk, 1999: *Global Transformations: Politics, Economics, and Culture*. Stanford: Stanford University Press.
- Hermi S., 2013: “Prasyarat Keberhasilan Kerja Sama Sister Province: Studi Kasus Sister Province Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Undip, Vol. 13, No. 2*.
- Hidayat, Syarif., 2008: “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State-Society Relation*” dalam *Jurnal POELITIK Vol.1 No.1*.
- Honey, M. 1999. *Ecotourism and Sustainable Development: How Owns Paradise*. Washington DC: Island Press.
- Horwich, Robert H et all. 1995. *Ekoturisme dan Pembangunan Masyarakat Pengalaman di Belize*. Ekoturisme: Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola. Penyunting Kreg Lindberg and Donald E. Hawkins. The Ecotourism Society North Bennington, Vermont
- Kementerian Sekretariat Negara, 2007: *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 20 November 2016  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=667](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667).
- Kementerian Sekretariat Negara, 2007: *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 30 November 2016  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=667](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667)
- Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 01/B/RO/IV/2015/01 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri,  
[http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA\\_PK\\_LKJ/RENSTRA\\_KEMENLU%020152019\\_FINAL\\_DONE\\_SK%20MENLU\\_pdf\\_version.pdf](http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA_KEMENLU%020152019_FINAL_DONE_SK%20MENLU_pdf_version.pdf).
- Kuznetsov, A. S., 2015: *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.
- Kuznetsov, A. S., 2015: *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.
- Lazuardi, H., 2014: *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016 <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.
- Lazuardi, H., 2014: *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 November 2016. <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.
- Lecours, A., 2008: *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.
- Lecours, A., 2008: *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.
- Mathews, J. T., 1997: “Power Shift” dalam *Foreign Affairs Vol. 76, No. 1*.
- Mawhood P. (ed), 1987: “*Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*”, Chicheser: John Wiley & Sons.
- Mukti, Yandu Setiya, 2013: “*Keberhasilan Kerjasama Sister Province Jawa Timur Dengan Gyeongsangnam-Do Korea Selatan Tahun 2006-2012*”, dalam <http://repository.upnyk.ac.id/5735/>

- Niluh Wayan, Budiari, 2013: “*Faktor Pendorong Keberhasilan Kerjasama Sister Province Antara Pemerintah Jawa Timur Dengan Australia Barat (2007-2012)*”, <http://eprints.upnyk.ac.id/3267/>
- Pemerintah Kota Semarang, 2014: *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Pemerintah Kota Semarang, n.d. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*, Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pikiran Rakyat, 2016: *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*. Diakses pada 29 November 2016 <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>
- Pikiran Rakyat, 2016: *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*. Diakses pada 29 November 2016, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>.
- Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema, 1983: “*Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*”, Washington D.C.: The World Bank.
- Roy, S. L, 1993: *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali.
- Ruland, J., 1993: “*Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*”, Boulder: Westview Press.
- Seputar Semarang, n.d. *Kawasan Industri Semarang*. Diakses pada 29 November 2016. <http://seputarsemarang.com/tag/kawasan-industri/>.
- Sergunin, A. & Joenniemi, P., 2014. Paradiplomacy as a Sustainable Development Strategy: The Case of Russia’s Arctic Subnational Actors. *Eurasia Border Review*, pp. 1-17.
- Setiadi, Rukuh, dan Samsul Ma'arif, 2009: "Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Riptek* 25-34.
- Sisk.Timothy D., et al., 2001: *Democracy At The Local Level*, International IDEA Handbook Series 4, Publications Office, International IDEA, Strömsborg, SE 103 34, Stockholm, Sweden.
- Smith, B.C., 1985: *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House
- Sumarto, Slamet, 1994. *Peran Serta Masyarakat dalam Peletarian Peninggalan Sejarah di Jawa Tengah Ditinjau dari Usia dan Sosial Ekonomi*. Tesis
- Tavares, R., 2016: *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.
- Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015: *Introduction to MICE Industry*. Diakses pada 30 November 2016. <http://msi.citu.tu.ac.th/uploads/news/file/20150820/en-bhlmppt01347.pdf>
- Van der Pluijm, Rogier & Jan Melissen, 2007: *City Diplomacy: The Expanding Role of the Cities in International Politics*. Hague: Netherlands Institute of International Relations.
- Wang, J., 2005: “Localising Public Diplomacy: The Role of Sub-national Actors in Nation Branding” dalam *Place Branding, Vol. 2, 1*, Palgrave Macmillan Ltd.
- Windiani, R., 2013:” HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA OTONOMI DAERAH: *Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007.*, dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4934>.

- Wunder, S.2000. *Ecotourism and Economic Incentive an Empirical Approach*. Ecological Economics. 29:465-479.
- Yoeti, Oka A. 2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. PT. Pertja Jakarta.